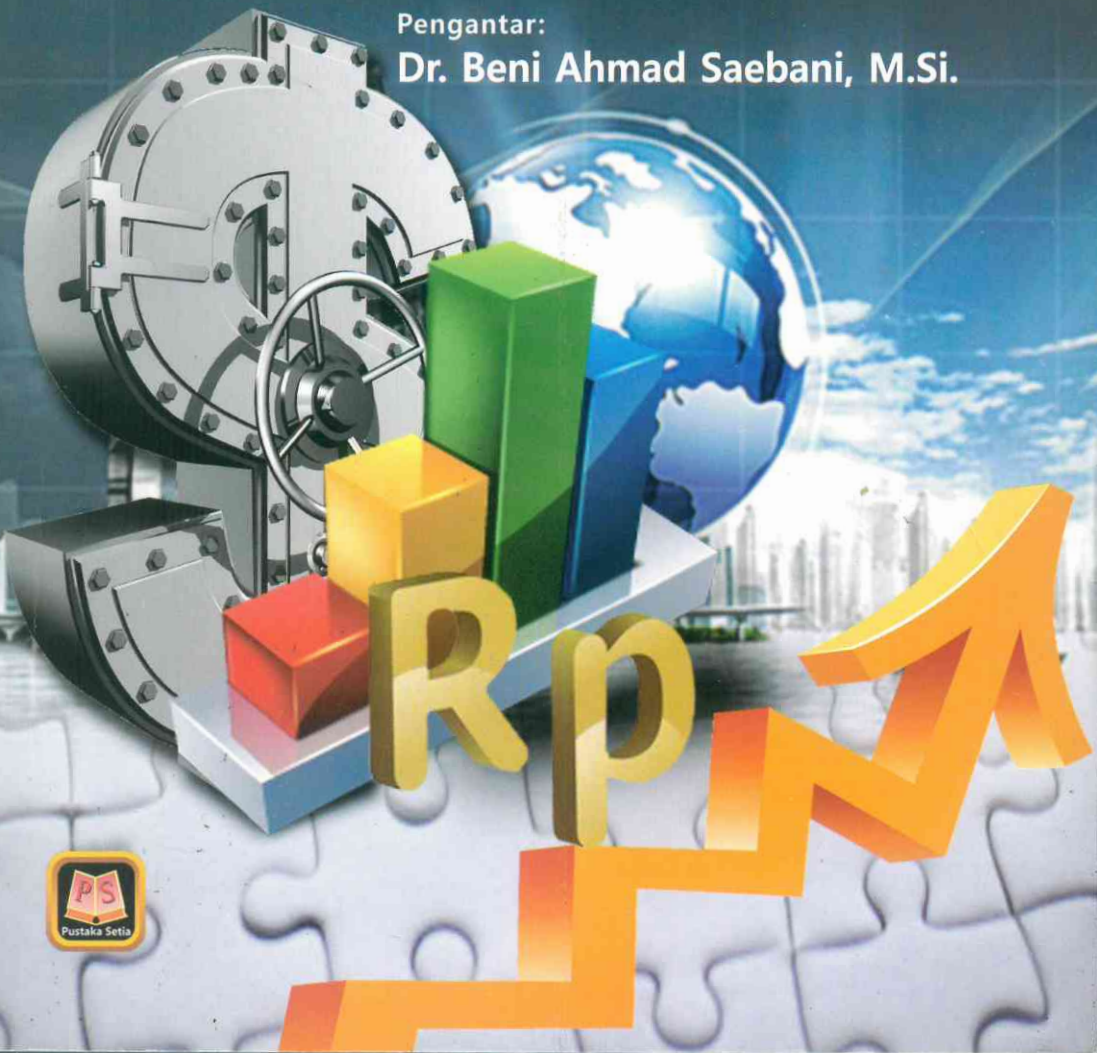


**Dr. Muslim Mufti, M.Si.**

# **EKONOMI POLITIK**

Pengantar:

**Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**



**Dr. Muslim Mufti, M.Si.**

# **EKONOMI POLITIK**

**Pengantar: Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**



**Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

---

**EKONOMI POLITIK**

ISBN 978-979-076-711-9

Cet. I: November 2018, 16 × 24 cm., xiv + 224 hlm.

Penulis: Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Desain Sampul: Tim Desain Pustaka Setia

Setting, Montase, Layout: Tim Redaksi Pustaka Setia

Cetakan ke-1: November 2018

Diterbitkan oleh:

**CV PUSTAKA SETIA**

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp. (022) 5210588, Faks. (022) 5224105

e-mail: pustaka\_seti@yahoo.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

---

Copyright © 2018 CV PUSTAKA SETIA

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

## KATA PENGANTAR

Menurut penulis buku ini, fokus studi ekonomi politik adalah fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Para pakar menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam menganalisis peristiwa dan fenomena yang tinggi kadar campuran ekonomi dan politiknya.

Konsep ekonomi politik pertama kali dimunculkan pada abad ke-18, yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari "ekonomi" menjadi "ekonomi politik". Istilah "ekonomi" diambil dari sebuah konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga, sedangkan "ekonomi politik" dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara.

Inti pendekatan ekonomi terhadap politik adalah konsep pilihan rasional dan konsep efisiensi. Pilihan harus dibuat oleh individu karena adanya kelangkaan sumber daya. Ketika individu membuat pilihan, individu harus menanggung biaya, seperti biaya peluang (*opportunity cost*) - atau kerugian dalam bentuk peluang lain yang tidak jadi dipilih.

Meresapi kajian buku ini sepintas saja menarik rasa dan pikiran kita untuk semakin dalam membacanya. Hal ini karena kajian yang dipaparkan oleh penulis merupakan perspektif baru, yakni memahami ekonomi politik dengan pendekatan sejarah, pendekatan filosofis, pendekatan kebijakan publik, dan pendekatan ekonomi. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca oleh mahasiswa sebagai literatur mata kuliah ekonomi politik. Saya mendukung terbitnya buku ini karena akan memperkaya khazanah keilmuan civitas akademika.

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

## PENGANTAR PENULIS

Ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Satu hal yang jarang diungkapkan bahwa ide ekonomi politik didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi. Konsep ekonomi politik dimunculkan pada abad ke-18 dengan tujuan untuk membantu orang dalam memahami dan mengatasi perubahan dramatis dalam sistem pemusatan kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat dari kebutuhan/keinginan maupun cara memproduksi serta mendistribusikan barang untuk memuaskannya. Menurut Bruno S. Frey, ekonomi politik adalah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi.

Ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Para pengambil keputusan (aktor) bidang ekonomi dan bidang politik bergantung pada satu sama lain dan keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik. Keputusan yang diambil oleh para aktor, dan karena itu perkembangan dan hasil seluruh sistem, bergantung pada aturan dan institusi yang membentuk kerangka dasarnya. Perilaku ekonomi, dengan kata lain, dapat dipengaruhi dengan mengubah aturan dan institusi. Perubahan ini terjadi melalui suatu konsensus sosial, dalam suatu situasi saat para aktor tidak dapat memastikan kepentingan pokok mereka akan terpenuhi dengan adanya perubahan aturan dan institusi itu atau tidak.

Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan memengaruhi pencapaian ekonomi. Ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Oleh karena itu, ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.

Secara umum, kajian ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Oleh sebab itu, harus dipahami bahwa pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* politik tempat kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi.

Buku ini disusun sesuai dengan kurikulum mata kuliah Ekonomi Politik yang disajikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga akan memudahkan mahasiswa mempelajarinya secara sistematis dan mendalam. Semoga kehadiran buku ini menyumbang pengetahuan bagi kita semua.

Dr. Muslim Mufti, M.Si.

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1</b>	
<b>ILMU POLITIK DAN ILMU EKONOMI</b> .....	1
A. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi .....	5
B. Sistem Kekuasaan Negara .....	8
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah .....	8
D. Berbagai Implementasi Kebijakan Pemerintah .....	10
<b>BAB 2</b>	
<b>EKONOMI POLITIK LIBERAL KLASIK</b> .....	13
A. Pendekatan Liberal Klasik .....	16
B. Paham Liberalisme .....	19

<b>BAB 3</b>	
<b>EKONOMI POLITIK PENDEKATAN MARXIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Awal Mula Ekonomi Politik Sosialisme .....	32
B. Sosialisme Marx .....	35
C. Kritik Marxis .....	39
D. <i>Manifesto of Communist Party</i> .....	40
E. Komunisme dan Masyarakat Tanpa Kelas .....	50
F. Sosialisme Libertarian .....	54
<b>BAB 4</b>	
<b>EKONOMI POLITIK NEOKLASIK .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB 5</b>	
<b>EKONOMI POLITIK KEYNESIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Dari Liberalisme Lama ke Liberalisme Baru .....	73
B. Kritik terhadap Teori Klasik .....	76
<b>BAB 6</b>	
<b>PERAN NEGARA DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PUBLIK .....</b>	<b>79</b>
A. Sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	79
B. Filosofi Pengelolaan Barang dan Jasa Kebutuhan Publik ....	81
C. Pengelolaan Barang dan Jasa Publik .....	82
D. Kebijakan dalam Privatisasi Barang Publik dan Semipublik	85
<b>BAB 7</b>	
<b>EKONOMI POLITIK LIBERALISM OTORITER, PEMERINTAH, DAN KEMUNCULAN REGULATORY STATE PASCAKRISIS DI ASIA TIMUR .....</b>	<b>97</b>

A. Kemunculan Tata Global Liberal yang Otoriter .....	98
B. Analisis Pergeseran Paradigma Ekonomi Politik .....	100
<b>BAB 8</b>	
<b>EKONOMI POLITIK TENTANG KEADILAN .....</b>	<b>103</b>
A. Teori Keadilan ( <i>Justice-Centered</i> ) .....	106
B. Argumentasi Libertarian .....	108
C. Argumentasi Kontraktarian Modern .....	112
D. Pendekatan Alternatif <i>Justice-Centered</i> .....	117
E. Kesimpulan .....	117
<b>BAB 9</b>	
<b>ANALISIS KRITIS TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN .....</b>	<b>119</b>
A. Konsep Kesejahteraan dalam Sektor Pertanian .....	123
B. Analisis Kesejahteraan dalam Sektor Pertanian .....	126
<b>BAB 10</b>	
<b>PENDEKATAN TEORI POLITIK GLOBALISASI .....</b>	<b>131</b>
A. Globalisasi Ekonomi dan Perekonomian Indonesia .....	134
B. Kebijakan Perdagangan, Peluang Tantangan Dunia Bisnis dan Peran Pemerintah dalam Era Globalisasi Ekonomi .....	135
C. Lembaga yang Berperan dalam Globalisasi Ekonomi .....	138
D. Tingkatan Globalisasi dan Sudut Pandang terhadap Globalisasi	142
E. Model-model Sistem Ekonomi Global .....	145
F. Dampak Ekonomi Global .....	146
G. Peran Bank Dunia dan IMF dalam Perekonomian Indonesia	150
<b>BAB 11</b>	
<b>PENDEKATAN BERBASIS KEKUASAAN DAN PENDEKATAN PILIHAN PUBLIK DALAM EKONOMI POLITIK .....</b>	<b>153</b>

A. Penafsiran tentang Kepentingan.....	154
B. Kekuasaan dan Perekonomian Pasar .....	154
C. Ekonomi Politik Pendekatan Pasar versus Pendekatan Negara	155
D. Globalisasi dan Perdagangan Bebas .....	162
E. Konspirasi Penyebab Kebangkrutan Negara Dunia Ketiga	165

## BAB 12

NEGARA KESEJAHTERAAN ( <i>WELFARE STATE</i> ) .....	171
A. Perkembangan Konsep <i>Welfare State</i> .....	171
B. Faktor-faktor Pendorong Munculnya <i>Welfare State</i> .....	172
C. <i>Welfare State</i> sebagai Prinsip dan Tanggapan Terhadap Skeptisme.....	173
D. Jawaban Sejarah terhadap Skeptisisme.....	174

## BAB 13

PERAN NEGARA DALAM EKONOMI POLITIK .....	177
A. Dimensi Kekuasaan dalam Ekonomi .....	177
B. Negara Relasi Kekuasaan.....	179
C. Pengaruh Ekonomi terhadap Kekuasaan Politik .....	182
D. Strategi Penanggulangan Kemiskinan .....	185
E. Contoh Kebijakan Sosial.....	187
F. Peran Pemerintah dalam Perekonomian .....	192
G. Kebijakan-kebijakan.....	196
H. Teori Merkantilis dalam Ekonomi Politik .....	203
I. Teori Keynesian dalam Ekonomi Politik .....	205
J. Teori Sosialis dalam Ekonomi Politik .....	206
K. Model Pertumbuhan Ekonomi .....	207

## BAB 14

PENGARUH LIBERALISASI TERHADAP EKONOMI POLITIK TINGKAT LOKAL DI INDONESIA .....	209
---	-----

Daftar Pustaka .....	219
Biografi Penulis .....	217

## BAB 1

# ILMU POLITIK DAN ILMU EKONOMI

Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik, yaitu menganggap ekonomi politik sama dengan politik ekonomi dan mengasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Bahkan, cenderung mendefinisikan ekonomi politik secara kata per kata atau menggunakannya untuk menganalisis dua bidang kajian, yaitu ekonomi dan politik. Padahal, analisis ekonomi politik bukanlah analisis yang mendikotomikan antara ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Di samping itu, wilayah kajian ekonomi dan politik terpisah jauh sehingga sulit untuk menyatukan dua bidang tersebut.

Menurut Erani, perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ide ekonomi politik didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi.



Konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari "ekonomi" menjadi "ekonomi politik". Istilah "ekonomi" diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga, sedangkan "ekonomi politik" dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Kemunculan ilmu ekonomi politik ini telah menimbulkan perdebatan tentang tanggung jawab dari pejabat negara yang berkaitan dengan negara serta bertujuan membantu orang dalam memahami dan mengatasi perubahan dramatis dalam sistem pemusatan kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat dari kebutuhan/keinginan maupun cara memproduksi serta mendistribusikan barang untuk memuaskannya.

Menurut Caporaso dan Levine, terdapat dua definisi umum tentang ekonomi. Pertama, definisi dari Alfred Marshall dalam buku karyanya berjudul *Principles of Economics*, yang ditulis tahun 1930. Menurutnya, ilmu ekonomi (*economics*) adalah penelitian terhadap manusia dalam kesibukannya sehari-hari. Ilmu ekonomi ini meneliti bagian dari tindakan individu dan tindakan sosial yang memiliki hubungan paling erat dengan pencarian dan pemanfaatan terhadap kebutuhan material dan kesejahteraan.

Definisi kedua berasal dari Lionel Robbins, yang tertuang dalam karyanya berjudul *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, yang ditulis pada tahun 1932. Menurut Robbins, ilmu ekonomi (*economics*) adalah ilmu yang meneliti perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan.

Bagi Caporaso dan Levine, definisi dari Marshall adalah selaras dengan ide bahwa kegiatan ekonomi adalah penyediaan sarana material untuk memenuhi kebutuhan. Adapun definisi Robbins dipandang lebih berkaitan dengan cara menyesuaikan cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ekonomi dari Robbins dipahami secara lebih abstrak karena ekonomi tidak merujuk pada kegiatan tertentu, tetapi merujuk pada cara yang digunakan untuk menyesuaikan sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara etimologi, ekonomi politik berasal dari dua suku kata, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang artinya rumah, dan *nomos* yang artinya aturan sehingga dapat didefinisikan sebagai manajemen rumah tangga. Adapun politik berasal dari kata "polis" yang berarti "kota/negara". Dengan demikian, ekonomi politik adalah manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Menurut Bruno S. Frey (1994), ekonomi politik adalah (gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai) saling ketergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, stabilisasi. Ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Para pengambil keputusan (aktor) bidang ekonomi dan bidang politik saling bergantung satu sama lain dan keduanya adalah aktor utama sistem ekonomi politik.

Ekonomi politik memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Oleh karena itu, menurut Caporaso ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.

Oleh karena itu, secara umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya instrumen-instrumen ekonomi, seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* politik tempat kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Hal-hal yang dipelajari ilmu ekonomi politik adalah penggunaan sistem kekuasaan dan pemerintahan sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi.

Proses ekonomi dengan pendekatan *setting* politik ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan politik ataupun pendekatan ekonomi. Fokus studi ekonomi politik adalah fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu

## BAB 2

# EKONOMI POLITIK LIBERAL KLASIK

Pada era klasik banyak ilmuwan kuno mengemukakan pendapatnya bahwa ekonomi dengan politik memiliki keterkaitan erat. Aristoteles, filsuf Yunani dalam bukunya *Politics*, menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu politik. Politik merupakan etika atau falsafah, sedangkan ekonomi berawal dari kata *eikos* (aturan/ tata cara) dan *nomos* (rumah tangga), memiliki arti seni mengolah rumah tangga. Pada masa praklasik, ilmu ekonomi politik diartikan seni mengolah rumah tangga negara sehingga ilmu ekonomi politik banyak diartikan juga sebagai ilmu tentang etika atau falsafah yang digunakan untuk mengelola negara menuju masyarakat yang sejahtera secara sosial dan makmur secara ekonomi.

Pemikiran pada masa praklasik ini diperkuat oleh James Steuart Mill dalam bukunya *An Inquiry Into the Principles of Political Economy*

(1767), ekonomi lebih sempit cakupannya daripada politik. Ekonomi hanya mengelola rumah tangga, sedangkan politik mengelola negara. Secara implisit, pandangan Steuart bahwa ekonomi berada dalam bagian ilmu politik, ekonomi harus tunduk dalam tatanan politik yang lebih makro. Pandangan ini dipercaya dalam tradisi para filsuf Yunani menjadi patron kenegaraan. Salah satunya Plato yang berpikiran bahwa individu merupakan organisme dari kelompok besar. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada kelompok besar. Dalam konteks ekonomi, ia menginginkan bahwa kepemilikan kekayaan secara pribadi (*privat*) harus dihapuskan karena akan menimbulkan problem sosial, yakni kejahatan dalam kehidupan sosial. Plato, dalam bukunya berjudul *Republik*, menjelaskan bahwa pertikaian tidak bisa dihindari dalam kelompok masyarakat jika muncul kepemilikan kekayaan dalam tataran perseorangan. Dalam konteks politik, Plato tidak percaya dengan demokrasi. Menurutnya, tidak mungkin memberikan hak suara bagi orang per orang karena tidak semua orang atau individu mengetahui hal-hal yang terbaik bagi masyarakat. Hanya kalangan filsuf yang mengetahui hal-hal terbaik dalam masyarakat karena mereka memiliki kemampuan dan ilmu, sedangkan masyarakat dan individu-individunya masih perlu dididik.

Dalam bukunya yang berjudul *Republik*, Plato membagi tiga kelas masyarakat pembagi kerja, yakni:

1. *rulers* (pengatur): raja, ilmuwan;
2. *auxiliaritis* (pelaksana): tentara, polisi, dan pamong praja;
3. *workers* (pekerja).

Dalam pembagian kelompok kerja tersebut, menurut Plato, para raja dan ilmuwan sebagai pihak penentu kerja dua kelompok di bawahnya.

Plato pun menyimpulkan bahwa negara akan ideal dan dapat berkembang jika dipimpin oleh para raja atau ilmuwan karena memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripada masyarakat secara individu. Dalam konteks ekonomi, kekayaan lebih lazim dimiliki oleh raja dan ilmuwan sehingga dalam kajian politik kenegaraan, kekayaan harus dikuasai oleh negara. Hal ini karena sumber daya yang ada dapat

didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan semuanya. Pada akhirnya, konflik, kekacauan yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi di tingkat horizontal tidak terjadi.

Hingga abad ke-14 pemikiran Plato menjadi dasar kenegaraan. Pada abad ini definisi ekonomi politik berkembang seiring dengan terjadinya Revolusi Perancis seri I, yang ditandai terjadinya transisi kekuasaan dari raja, gereja, kepada kaum saudagar (*merchant*). Era inilah oleh kalangan ilmuwan masa kini disebut sebagai era merkantalisme.

Era ini memiliki persepsi bahwa untuk memajukan suatu negara dapat diperoleh dari surplus ekspor dan impor. Era ini mengagungkan perdagangan dan perniagaan. Dalam kajian ekonomi politik, aliran ini merupakan aliran pertama yang menghendaki campur tangan negara untuk membangun perekonomian negara. Campur tangan pada era ini, yaitu:

1. memberikan fasilitas kepada industri yang baru tumbuh;
2. membangun kebijakan monopoli;
3. memberlakukan pajak impor untuk produk penting dalam nilai yang tinggi sehingga tidak memungkinkan barang tersebut menguasai wilayah pasar suatu negara itu.

Tujuan campur tangan pemerintah ini adalah memperbesar surplus karena model transaksi pada masa ini menggunakan alat tukar batangan emas sehingga jika terjadi surplus, negara akan kaya.

Kritik dalam era merkantalisme ada pada: (1) hasil niaga hanya dinikmati oleh para saudagar yang berkolaborasi dengan penguasa; (2) kebijakan pemerintah tidak dinikmati oleh petani yang hidup dalam keadaan tekanan; (3) potensi konflik antarnegara lebih mengemuka.

#### Fisiokratisme

Aliran ini dikembangkan oleh Francois Quesnay (1694-1774). Pemikiran fisiokratisme merupakan kebalikan dari pemikiran merkantalisme yang mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negerinya. Kaum fisiokrat cenderung menekankan pada perdagangan yang lebih steril (bersih dan alami). Aktivitas produktif menurut ukuran fisiokrat adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam, seperti pertanian dan pertambangan.

## BAB 3

# EKONOMI POLITIK PENDEKATAN MARXIAN

Dalam teori Marxian, konsep ekonomi relatif dari negara merupakan penolakan terhadap pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksanaan dari kepentingan individu tertentu, yaitu kaum kapitalis dan kepentingan masing-masing. Negara dipandang memiliki kepentingan sendiri yang ideologis, bahwa kepentingan negara harus disimpulkan dari pemahaman tentang bentuk struktur masyarakat dan cara mempertahankan kohesi sosial sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan pribadi dalam jangka panjang oleh individu-individu di dalamnya. Kepentingan yang hendak dicapai oleh negara adalah mempertahankan tataran sosial tertentu.

Untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis membawa dampak politik, Marx mengajukan kritik terhadap pandangan klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Ia

melakukan kritik bukan untuk membenarkan konsep kapitalisme yang dikendalikan negara, melainkan untuk menunjukkan bahwa kapitalisme tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Hal ini karena menggunakan konsep kesadaran kelas antara kelas pekerja dan kelas kapitalis akan memperjelas gap antara kaum pekerja dan kaum kapitalis atau pemilik modal. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Marx yang disampaikan Charles Bettelheim (1985) bahwa akibat dari hubungan produksi (*reletion of production*) menjadikan sebuah masyarakat menjadi beberapa kelas.

Ekonomi politik Marxis bersumber pada ajaran-ajaran ekonomi politik klasik Inggris, terutama dasar-dasar teori nilai kerja yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Marx membangun teorinya bahwa krisis umum kapitalisme itu tidak terhindarkan dan bahwa sistem kapitalisme harus menyingkir dan digantikan oleh sistem sosialis.

Ekonomi politik Marxian merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar (kapitalisme). Pilar kelembagaan kapitalisme tersebut diyakini oleh Marx sangat eksploitatif karena menempatkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Hal ini terjadi karena dalam kapitalisme, penciptaan pranata-pranata faktor produksi selalu terlambat dari percepatan inovasi produksi (teknologi). Dalam terminologi ekonomi, pranata faktor-faktor produksi tersebut adalah kelembagaan yang mengatur interaksi antara pemilik modal, tanah, dan tenaga kerja.

Caporaso Livine menilai cara pandang Marx dalam memandang hubungan antara agenda politik dan faktor-faktor ekonomi. Marx dipandang tetap berpegang pada pemahaman klasik bahwa ekonomi merupakan bidang tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang terpisah dari bidang-bidang lain, tetapi Marx mengajukan konsep yang berbeda dari pemikir-pemikir klasik lain tentang hubungan antara bidang politik dan bidang ekonomi.

Marx memandang komoditas sebagai "bentuk sel" atau satuan bangunan dari masyarakat kapitalis — ini adalah objek yang berguna bagi orang lain, tetapi dengan nilai jual bagi pemilik. Karena transaksi komersial tidak menyiratkan moralitas tertentu di luar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksinya, pertumbuhan pasar menyebabkan

dunia ekonomi dan dunia moral-legal menjadi terpisah dalam masyarakat: nilai subjektif moral menjadi terpisah dari nilai objektif ekonomi.

Ekonomi politik, yang awalnya dianggap sebagai "ilmu moral" yang hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan yang adil atau sebagai suatu "aritmetika politik" untuk pengumpulan pajak, dikalahkan oleh disiplin ilmu ekonomi, hukum dan etika yang terpisah.

Marx percaya bahwa para pakar ekonomi politik dapat mempelajari hukum-hukum kapitalisme dalam cara yang "objektif" karena perluasan pasar pada kenyataannya telah mengobjektifikasikan sebagian besar hubungan ekonomi: cash nexus membuang semua ilusi keagamaan dan politik sebelumnya (kemudian menggantikannya dengan ilusi jenis lain — fetishisme komoditas). Marx juga mengatakan bahwa ia memandang "formasi ekonomi masyarakat sebagai suatu proses sejarah alam". Pertumbuhan perdagangan terjadi sebagai suatu proses yang di dalamnya tidak seorang pun dapat menguasai atau mengarahkan, menciptakan suatu kompleks jaringan-kesalingterkaitan sosial yang sangat besar secara global. Dengan demikian, suatu "masyarakat" terbentuk "secara ekonomi" sebelum orang secara sadar menguasai kapasitas produktif yang sangat besar dan kesalingterkaitan yang telah mereka ciptakan, yang dibangunnya secara kolektif untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, analisis Marx difokuskan pada kontradiksi struktural daripada antagonisme kelas, yang mencirikan masyarakat kapitalis — "gerakan kontradiktif" [*gegensätzliche Bewegung*] [yang] berasal pada sifat ganda pekerjaan," bukan dalam perjuangan antara tenaga buruh dan modal atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Lebih jauh, kontradiksi ini beroperasi (seperti yang digambarkan oleh Marx dengan menggunakan ungkapan yang dipinjam dari Hegel) "di belakang punggung" kaum kapitalis ataupun buruh. Artinya, sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas mereka, tetapi tidak dapat diminimalkan ke dalam kesadaran mereka, baik sebagai individu maupun sebagai kelas. Oleh karena itu, *das kapital* tidak mengusulkan suatu teori revolusi (yang dipimpin oleh kelas buruh dan wakil-wakilnya), tetapi teori tentang krisis sebagai kondisi untuk potensi revolusi, atau yang dirujuk oleh Marx dalam Manifesto Komunis sebagai "senjata" potensial,

Banyak pendukung yang sering menyarankan fokus eksplorasi atas predeterminasi sebagai satu dari kekuatan besar mereka. Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan metode saintifik datang dari ketaatan pada eksplorasi rasional yang terbuka, bukan pada kesimpulannya atau dogma dan prediksi yang telah ditentukan (yang mereka tuduh banyak dilakukan teoretikus Marxis).

Meskipun banyak kritikus yang menyatakan mereka menghindari pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, kaum sosialis libertarian percaya bahwa pendekatan metodologis pada eksplorasi merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan sosial. Bagi mereka, pendekatan dogmatik pada organisasi sosial hanya akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, menolak gagasan "sejarah" yang linear dan tidak terelakkan. Anarkis ternama Rudolf Rocker pernah menyatakan, "Aku seorang anarkis bukan karena aku memercayai anarkisme adalah tujuan akhir, melainkan karena tidak ada yang namanya tujuan akhir" (*The London Years*, 1956).

## BAB 4

# EKONOMI POLITIK NEOKLASIK

Pandangan ekonomi politik neoklasik terhadap permasalahan ekonomi (produksi), dari sudut pandang neoklasik di bidang produksi, fokusnya adalah menyejahterakan rakyat, tetapi tidak memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri.

Pendekatan neoklasik dianggap lahir pada dekade 1870 bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Sebelum tahun 1970, ilmu ekonomi adalah sebuah pemikiran yang didominasi oleh teori nilai dan tenaga kerja. Setelah dekade 1870-an, agenda ini mengalami perubahan, tetapi tidak terlalu drastis.

Dalam ekonomi politik klasik, pasar dipandang sebagai sistem yang terdiri atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antara beberapa pemilik properti yang independen, yang sama-sama mengejar kepentingan masing-masing. Menurut pandangan

neoklasik, transaksi ini terjadi jika dianggap memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Aliran neoklasik ini secara sederhana dibedakan atas dua generasi. Generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik. Generasi kedua memiliki pandangan sendiri terhadap pasar. Para pakar ekonomi neoklasik generasi pertama dibedakan lagi atas dua kelompok, yaitu kelompok Austria karena hampir semua pendukungnya, seperti Carl Menger, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Böhm-Bawer berasal dari Austria. Pada saat itu ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat di tangan para pakar neoklasik dari Austria. Kedua adalah kelompok ekonomi *Cambridge* karena para pendirinya seperti Alfred Marshall dan pendukungnya berasal dari University of Cambridge.

Aliran ekonomi politik neoklasik generasi kedua muncul pada tahun 30-an dengan pakarnya Piero Sraffa, Joan Violet Robinson, dan Edward Chamberlin. Jika pakar ekonomi klasik mengasumsikan pasar persaingan sempurna, pakar-pakar neoklasik generasi dua justru menganggap pasar sebagai tempat persaingan yang tidak sempurna karena bisa berbentuk kompetisi, monopoli, atau oligopoli. Perbedaan dari cara pandang inilah yang membedakan klasik dan neoklasik. Dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual banyak dan tiap-tiap pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen maupun perusahaan tidak mempunyai daya untuk memengaruhi harga-harga yang terbentuk di pasar. Adapun dalam persaingan tidak sempurna, jumlah penjual terbatas. Apalagi dalam proses monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Semakin sedikit jumlah perusahaan, semakin tinggi kapasitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memengaruhi harga-harga dan *output* di pasar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa landasan teori yang digunakan dalam perspektif ekonomi politik neoklasik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perspektif ekonomi politik klasik. Menurut Grindle (1989), teori ekonomi politik dibedakan atas dua kelompok: (1) pendekatan terpusat ke masyarakat dan (2) pendekatan terpusat ke negara.

## 1. Hak Kepemilikan

Dalam pendekatan neoklasik, hak kepemilikan memegang peran sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir para ekonom neoklasik yang membahas hak kepemilikan, memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem hukum yang dibentuk melalui sistem ekonomi.

Hak kepemilikan (*property rights*) adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Kekayaan (properti) adalah properti dalam artian fisik, yaitu konsumsi, mesin, dan tanah. Tenaga kerja adalah hak kepemilikan juga. Ada dua teori tentang hak kepemilikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Teori positif. Bagi positivis, hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik sehingga hak kepemilikan boleh diganggu gugat sama halnya dengan hal politik lainnya.
- b. Hak kepemilikan tidak statis. Hak kepemilikan merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran, tetapi sifat dan jangkauan hak kepemilikan bisa berubah pada perkembangan selanjutnya.

## 2. Eksternalitas

Eksternalitas adalah dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain (Rhoads, 1985: 113). Dalam pasar, semua transaksi bersifat pribadi. Jika ada pihak ketiga yang dilibatkan di dalamnya, pihak ketiga ini biasanya diberi imbalan atau dikenakan biaya. Semua biaya yang ditanggung oleh produsen sama dengan biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dan keuntungan yang didapat oleh produsen sama dengan keuntungan yang didapat oleh keuntungan masyarakat.

Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan cara denda dan subsidi melalui harga, regulasi pemerintah dengan melakukan standar dan ancaman hukuman. Dengan kata lain, diberikan larangan yang

## BAB 5

# EKONOMI POLITIK KEYNESIAN

Pendekatan keynesian berada pada kritikan teori klasik dan neoklasik yang mengatakan bahwa pasar yang mengatur sendiri dirinya.

James A. Caporaso dan David P. Levine melakukan eksplorasi argumen Keynesian dan beberapa implikasinya bagi pergeseran hubungan antara politik dan ekonomi. Ketika kewenangan publik semakin banyak mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh pasar bebas, cara pemikiran kita terhadap ekonomi mengalami perubahan. Upaya untuk membenarkan sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan mengkritik asumsi-asumsi dasar dari sistem itu tentang sejauh mana seharusnya pasar dibatasi.

Hal-hal yang dilakukan Keynes dan kemudian diadopsi oleh negara-negara Barat bukanlah peningkaran terhadap kapitalisme.



Menurut Mark Skousen, Keynes justru menjadi penyelamat kapitalisme dari kehancuran meskipun pemikiran ekonominya bertolak belakang dengan doktrin *laissez faire*.

Serangan J.M. Keynes tahun 1936 adalah terhadap kaum klasik bukan pada kaum neoklasik, meskipun sebenarnya kedua paham/ajaran mempunyai persamaan besar dalam kepercayaan terhadap kekuatan (mekanisme) pasar. Kritik Keynes terhadap kaum neoklasik, yaitu asumsi-asumsi ajaran neoklasik yang tidak realistis atau tidak cocok dengan kenyataan hidup.

Dalam bukunya yang lain, *The End of Laissez Faire*, diterbitkan pada tahun 1926, Keynes secara jelas menunjukkan adanya perbedaan antara liberalisme baru dan liberalisme lama (klasik). Keynes menyatakan bahwa filosofi *laissez faire* didasarkan pada pemikiran masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks masa kini.

Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Revolusi liberalisme bermakna bergantinya manajemen ekonomi yang berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini, pemerintah menjalankan kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya publik seperti subsidi sehingga fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Landasan dasar pemikiran konsep ekonomi-politik keynesian, antara lain gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Konsep pasar atau market dilihat sebagai salah satu dari berbagai model hubungan sosial bentukan manusia. Karena pasar bukan gejala alami, pasar dapat diciptakan dan dibatalkan menurut desain dari kehendak manusia. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan politik yang bertugas menciptakan sederet kondisi bagi operasinya agar adil dan kompetitif.

Dengan demikian, negara yang dipimpin oleh mentor Keynesian harus menjalankan perekonomian untuk mengontrol konsumen dengan cara menyesuaikan pajak dan menurunkan tingkat bunga

menuju titik nol, khususnya, melibatkan diri dalam "sosialisasi investasi yang cukup komprehensif". Keynes beranggapan bahwa hal ini tidak berarti sosialisme negara secara total dan menunjukkan bahwa yang penting untuk diambilalih oleh negara bukanlah kepemilikan instrumen produksi. Jika negara dapat menentukan jumlah agregat sumber-sumber daya untuk tujuan menambah instrumen-instrumen tersebut dan menetapkan ganjaran dasar bagi mereka yang memilikinya, ia telah mencapai semua yang diperlukan.

Aliran keynesian menerima argumen bahwa jika perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja sendiri tanpa regulasi dari luar, tidak bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia. Kegagalan ini akan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi. Dalam aliran ini, ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang tangan tidak terlihat (*invisible hands*). Aliran keynesian berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dan proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai.

Keynes juga menyanggah konsep ekuilibrium yang banyak digunakan oleh pemikir-pemikir pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dan konsep "tangan tak terlihat" dari Adam Smith dan para pencetus awal dari konsep *laissez-faires* (pasar bebas).

## 1. Pasar Kapital dan Instabilitas

Keynes berpendapat bahwa pergeseran pola pikir para pelaku pasar dari perspektif jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis stabilitas dalam perekonomian kapitalis. Ia memandang bahwa pergeseran ini terjadi karena berkembangnya pasar sekuritas yang menurutnya memberikan alternatif peluang yang lebih menarik bagi para investor daripada berinvestasi pada pabrik dan peralatan.

## 2. Ekonomi Politik dari Pasar Tenaga Kerja dan Pasar Kapital

Ciri khas pendekatan keynesian yang membedakannya dengan pendekatan neoklasik dapat dilihat pada pendekatan keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan pada masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi.

## BAB 6

# PERAN NEGARA DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PUBLIK

### A. Sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan salah satu badan dari pemerintahan yang penting dalam upaya memenuhi hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu agen pembangunan, BUMN memiliki peran penting dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pada masa mendatang, peran ini akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut akan terlihat dari perubahan status BUMN. Peningkatan status ini sebagai unit (*business entity*) yang dapat berfungsi secara komersial.

Pasal 33 ayat 2 dan 3 secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Dalam kalimat tersebut, secara jelas negara Indonesia memosisikan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sejak Indonesia merdeka, fungsi dan peranan perusahaan negara sudah menjadi perdebatan di kalangan *founding fathers*, terutama pada kata dikuasai oleh negara. Bung Karno menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian masih lemah pasca kemerdekaan, negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Adapun Bung Hatta menentang pendapat ini dan memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang menguasai kebutuhan pokok masyarakat, seperti listrik dan transportasi. Pandangan Hatta ini kemudian lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, yakni posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan (Rice, Robert C., 1983, *The Origin of Basic Economic Ideas and their Impact on New Order Policies*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*).

Adapun tujuan mendirikan perusahaan negara dan nasionalisasi menurut Bung Karno adalah mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan negara yang bergerak dalam bidang infrastruktur. Sederetan perusahaan Belanda dinasionalisasi, seperti PT Kereta Api atau Djawatan Kereta Api (UU 71/1957), PT Pos (Djawatan Pos), PT Garuda Indonesia Airways, dan pada akhir pemerintah Soekarno sempat mendirikan Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi. Akan tetapi, sebagian perusahaan yang dinasionalisasi oleh Pemerintahan Soekarno banyak merugikan negara karena Belanda sudah terlebih dahulu mengalihkan aset perusahaannya ke Belanda. Walaupun demikian, perusahaan vital dan strategis pada akhirnya menjadi jati diri bangsa.

1 Dr. Riant Nugroho dan Randy R. Vrihatnolo, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1.

## B. Filosofi Pengelolaan Barang dan Jasa Kebutuhan Publik

Pelayanan publik/pelayanan umum berkaitan dengan upaya penyediaan barang publik atau jasa publik dapat dipahami dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa.<sup>2</sup> Howlett dan Ramesh membedakan adanya empat macam barang/jasa, yaitu sebagai berikut.<sup>3</sup>

1. Barang/jasa privat, yaitu barang/jasa yang tingkat eksklusivitas dan keterhabisannya sangat tinggi. Contoh: pakaian atau jasa tukang pijat yang dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguna, kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain jika telah dibeli oleh beberapa pengguna.
2. Barang/jasa publik, yaitu barang/jasa yang tingkat eksklusivitas dan keterhabisannya sangat rendah. Contoh: penerangan jalan, keamanan atau kenyamanan lingkungan yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak habis meskipun telah dinikmati banyak pengguna.
3. Peralatan publik atau barang/jasa semipublik, yaitu barang/jasa yang tingkat eksklusivitasnya tinggi, tetapi tingkat keterhabisannya rendah. Contoh: jalan tol atau jembatan yang tetap masih dapat dipakai oleh pengguna lain setelah dipakai oleh seorang pengguna, tetapi memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pengguna.
4. Barang/jasa milik bersama, yaitu barang/jasa yang tingkat eksklusivitasnya rendah, tetapi tingkat keterhabisannya tinggi. Contoh: ikan, penyu, karang di laut yang kuantitasnya berkurang setelah terjadinya pemakaian, tetapi tidak dimungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya secara langsung kepada orang yang menikmatinya.

2 Michael Hawlett dan M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford: Oxford University Press, 1995, hlm. 33.

3 *Ibid.*, hlm. 34.

## BAB 7

# EKONOMI POLITIK LIBERALISM OTORITER, PEMERINTAH, DAN KEMUNCULAN *REGULATORY STATE* PASCAKRISIS DI ASIA TIMUR

Buku Richard Roninson tentang *politics in the wake of the asia crisis* menjelaskan bahwa globalisasi telah melemahkan pembangunan negara. Kajian ini akan mengeksplorasi salah satu isu utama pada volume ini, yakni perubahan yang diakibatkan oleh meluasnya pasar global yang berdampak pada ekonomi politik di kawasan Asia Timur. Negara-negara di kawasan tersebut membentuk struktur pembangunan dalam lingkup globalisasi. Berdasarkan perspektif ini, *The Development State*, merupakan hasil dari sistem paska perang pemerintahan global. Pemerintahan global ini yang memberi pengaruh pada bentuk pemerintahan domestik. Singkatnya, bentuk negara pembangunan (*the developmental state*) berubah secara cepat bertransformasi menjadi bentuk baru negara berpertauran (*regulatory state*).

## A. Kemunculan Tata Global Liberal yang Otoriter

### 1. Landasan Normatif

Argumen utama dalam pembahasan ini bahwa struktur pascaperang menyediakan lingkungan yang permisif bagi tumbuhnya dan konsolidasi negara berkembang. Bentuk terhadap moda otoriter liberalisme memungkinkan munculnya *The Regulatory State*. Tujuan kemunculan tersebut adalah menyelamatkan dan menjaga stabilitas pasar. Unsur utama otoritarianisme liberal adalah hadirnya negara dualistis, yakni gabungan antara negara dan ekonomi pasar liberal.

Gagasan negara dualistis (*dualistic state*) ini menandai gagasan penting negara berperaturan (*regulatory state*) bahwa di negara tersebut, pasar (*markets*) dilindungi dari intervensi politik. Namun, ketika sistem ini berhasil, negara membutuhkan institusi pengatur yang kuat (Fraenkle, 1941).

Dalam karyanya tentang perubahan terkini pada ekonomi internasional, Gill (1995) menggambarkan perhatian pada gagasan bahwa tata ekonomi global bergerak meningkat menjadi konstitusionalisme baru, yakni sesuatu yang membentuk perdagangan internasional dan bagian signifikan dari ekonomi domestik. Gill mendefinisikan konstitusionalisme baru neo-liberalisme sebagai berikut, "Dimensi politik makro dari proses yang hakikat dan tujuan ruang publik dalam OECD didefinisikan ulang dengan cara yang lebih privat dengan kriteria ekonomi didefinisikan dalam lingkup yang global serta referensi dengan frame yang abstrak" (Gill, 1995: 412).

### 2. Bank Sentral

Salah satu bagian penting dalam pembangunan pemerintahan adalah munculnya bank sentral yang memainkan peran yang penting. Bank sentral seperti institusi ekonomi lain, juga membutuhkan perlindungan intervensi politik. Untuk itu, dibutuhkan legislatif, bahkan penyekatan konstitusi. Sebagai konsekuensi, independensi bank sentral dianggap sebagai manifestasi yang penting dalam konstitusionalisme ekonomi yang sangat vital bagi liberalisme

otoritarian. Sebagaimana institusi ekonomi yang lain, kebijakan dan manajemen bank sentral terlepas dari pertanggungjawaban politik.

Poin yang harus diperhatikan tentang independensi bank sentral adalah kunci tertentu industri dan kelompok sosial memiliki preferensi yang jelas untuk kebebasan bank sentral. Keinginan untuk memperoleh kebebasan bank sentral didorong oleh dua kondisi objektif, yaitu memiliki anti-inflasi dan kebijakan moneter yang kredibel.

Pada kenyataannya, kebanyakan perbincangan tentang bank sentral dipengaruhi oleh gagasan ekonomi yang menekankan pada pentingnya menambah kredit ekonomi. Hal ini hanya dapat dicapai melalui bentuk konstitusionalisme ekonomi yang memberikan bank sentral kewenangan dari politik.

Oleh karena itu, alasan utama untuk memperluas kekuatan bank sentral adalah pertumbuhan kebijakan moneter pada era yang didominasi oleh tekanan akan integrasi keuangan global yang semakin meningkat. Tren ini bukan hanya menghasilkan bentuk instrumen kebijakan dari fiskal ke kebijakan moneter, melainkan juga membentuk kekuasaan dalam negara terhadap agen-agen seperti bank sentral. Bank sentral memainkan peran penting dalam hubungan ini, yakni antara politik domestik dan eksternal, sebagaimana mereka ditempatkan secara ideal untuk menyediakan mekanisme yang dengan adanya mekanisme tersebut, kekuatan internasional ditransmisikan menjadi ekonomi politik domestik.

### 3. Kesimpulan: dari Negara Pembangunan ke Negara Berperaturan

Kemunculan tata ekonomi liberal otoritarian merupakan capaian terbaik dari gagasan program pemerintahan yang *fashionable*, yakni gagasan tentang transparansi. Penerapan transparansi pasar, yang begitu penting bagi konstitusionalisme ekonomi dan bagi tata liberal otoriter, membutuhkan yuridiksi institusi pasar. Liberalisme otoriter berusaha menjelaskan kesimpangsiuran arus politik dalam wilayah pasar. Sebagai risikonya, konstitusi tata ekonomi melalui konstitusi ekonomi kerap berdiri secara kontras dengan institusi dan struktur konstitusi politik. Transparansi dan akuntabilitas, dua program ganda pemerintah, ternyata tidak konsisten.

## BAB 8

# EKONOMI POLITIK TENTANG KEADILAN

Membahas keadilan berarti membahas keseimbangan yang adil antara mayoritas dan minoritas. Satu problem yang menetap dalam debat tentang keadilan sosial adalah cara distribusi sumber-sumber daya dilakukan sehingga pemerataan dapat dicapai tanpa melanggar hak individual. Dalam terminologi filsafat politik, keadilan adalah mendamaikan *liberty* dan *equality*, dan mengangkatnya ke suatu konsepsi keadilan yang utuh.

Rawls berargumen bahwa *liberty* dan *equality* dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan, yaitu "setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan apabila terjadi ketidakadilan, kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan olehnya". Inilah prinsip yang harus tertanam di institusi-institusi sosial dalam mewujudkan keadilan sosial. "*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*".

Caporaso menggunakan konsep John Rawls dengan memberikan alternatif jalan keluar dengan menggunakan *mind game*. Menurutnya, bagi seorang yang kaya-raya sangat rasional dalam menentang usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Sebaliknya, untuk seorang yang miskin, rasional baginya mendukung usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Keduanya memiliki kepentingan berbeda dan akan berpendapat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kebijakan manakah yang akan diambil oleh pemerintah? Kebijakan manakah yang paling adil? Sebagai jawaban atas pertanyaan seperti ini, Rawls menyuguhkan jawaban dengan menggunakan dua kondisi imajiner yang menghasilkan satu *rule: original position, veil of ignorance* dan *maximin rule*.

*Original position* atau posisi awal adalah kondisi imajiner bahwa setiap orang berada dalam keadaan awal yang sifatnya setara. Diasumsikan bahwa dalam keadaan awal ini, semua orang memiliki hak dan akses yang sama untuk memilih prinsip yang akan diterapkan apabila mereka dikembalikan kepada kenyataan nantinya. *Original position* berguna dalam membuat kebijakan publik atau konstitusi. Dalam membuat konstitusi, masyarakat berada dalam keadaan *in natura*, dalam kondisi setara, tanpa kelas dan tanpa hierarki.

Orang-orang yang berada dalam *original position* diasumsikan berada di belakang *veil of ignorance*. Dalam hal pembuatan konstitusi misalnya, mereka diasumsikan tidak tahu, bahwa setelah dikembalikan pada kenyataan mereka akan menjadi turunan ningrat, orang berkulit putih, anggota suku terpencil, industrialis kaya, buruh atau orang kulit hitam. Mereka tidak mengetahui tingkat intelektualitas nantinya, kekuatan, kesehatan, dan hal-hal sejenisnya. Apabila mengetahui status dan peranan dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam membuat klausul konstitusi, mereka cenderung berpihak pada kepentingannya: yang nantinya menjadi industrialis, ingin agar upah buruh murah; yang nantinya ditakdirkan menjadi buruh ingin gaji yang paling tinggi dan banyak libur. Dengan *veil of ignorance*, masyarakat tidak mengetahui posisinya dalam kenyataan. *Veil of ignorance* ini penting supaya konstitusi, hukum, atau kebijakan publik lainnya yang dihasilkan berlaku adil bagi setiap anggota masyarakat.

Hal tersebut karena mereka semua dalam *original position* memiliki kesetaraan dan tidak bisa melihat kenyataan karena dihalangi oleh *veil of ignorance*, pengambilan keputusan yang paling rasional bagi para pihak adalah keputusan Maximin (*maximum minimorum*), mengambil keputusan yang paling maksimal dari pilihan minimal.

Ada beberapa *basic assumption* agar dalam masyarakat bekerja sama dalam kondisi *fair*. Pertama, anggota masyarakat tidak memandang tatanan sosial masyarakat tidak berubah. Masyarakat harus menuju keadilan sehingga masyarakat terbuka pada perubahan, terutama perubahan struktur sosial.

Kedua, kerja sama dibedakan dengan aktivitas yang terkoordinasi. Hal ini dapat dilihat dari:

1. bentuk kerja sama selalu berpijak pada keadilan, sedangkan *coordinated activity* berpijak pada efektivitas/efisiensi;
2. kerja sama (*organizing principle*) aturan dibuat untuk mengatur anggota-anggotanya (mengikat, mengatur kepentingan anggota), sedangkan dalam *coordinated activity* aturan dibuat untuk kepentingan yang membuat aturan;
3. kerja sama (*organizing principle*) harus sah secara publik (harus disepakati oleh partisipan), sedangkan dalam *coordinated activity*, tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara publik.

Ketiga, gagasan kerja sama yang *fair* mengandaikan kebaikan akan keuntungan partisipan (partisipan mempunyai gagasan sendiri dan bertemu dengan gagasan lainnya dengan cara rasionalitas). Setiap pihak tidak melepaskan kepentingan, tetapi ingin mempunyai keuntungan yang rasional (karena ingin mendapatkan untung, ada kerja sama, jika saling mengalah, tidak akan tercapai kerja sama).

Resiprositas dalam kerja sama yang *fair* bukan berarti meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan bukan merumuskan aturan berdasarkan kekinian dan ekspektasinya.

Untuk mencapai keadilan, keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang per orang (*particular*), melainkan bertolak dari *pure procedural of justice*. Ide dari resiprositas ada pada *different principles* yang mempunyai fungsi untuk mewujudkan ide

internasional. Ekonomi politik jelas bukan hanya cara mempelajari atau memahami.

Pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena kehidupan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Secara garis besar keadilan ada pada tiga bidang. *Pertama*, tentang prinsip moral yang menekankan bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh individu sifatnya arbitrer, atau dengan kata lain tidak dimiliki sepenuhnya karena merupakan kebetulan/keberuntungan (*natural lottery*). *Kedua*, berkaitan dengan aturan. Caporaso tetap memegang keyakinan dengan prinsip perbedaannya bahwa ekspektasi orang yang beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak beruntung. *Ketiga*, berkaitan dengan distribusi. Caporaso melihat pola distribusi sah jika *primary goods* terdistribusi secara merata/sempurna. Dengan kata lain, keberuntungan orang yang beruntung harus mengangkat juga orang yang paling tidak beruntung.

## BAB 9

# ANALISIS KRITIS TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN

*The Wealth of Nations* (1776) karya Adam Smith menjadi sebuah pijakan konseptual pembentukan negara kesejahteraan. Dalam diktumnya yang terkenal, *defense comes before opulence*, Smith<sup>1</sup> menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. *Pertama*, menjaga keselamatan dan kebebasan warga dari serangan pihak luar serta perbudakan. Pemerintah sebagai instrumen negara harus membela rakyatnya meskipun pelaksanaan tujuan tersebut mengharuskan pengorbanan finansial yang besar. *Kedua*, melindungi setiap anggota

---

1. Adam Smith, *An Inquiry the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, The University of Chicago Press, Chapter ix, hlm. 183.



masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota masyarakat. Ketidakadilan harus dilenyapkan. Hal ini karena kesejahteraan sulit terwujud dan dirasakan semua anggota masyarakat, jika ketidakadilan berlaku. *Ketiga*, kewajiban negara berkaitan dengan fungsinya sebagai institusi. Negara berkewajiban menciptakan lembaga (institusi) publik untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan hal-hal tersebut, tidak berlebihan jika para ahli menyatakan bahwa hakikat sebuah negara dapat diukur dengan ada atau tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat. Artinya, jika kesejahteraan tidak dapat dirasakan, negara dianggap tidak ada. Realisasi dari kesejahteraan juga dilakukan dalam konteks masyarakat pada era pasar bebas (*laissez faire*). Bahkan, dapat dipahami bahwa gagasan pasar bebas sesungguhnya bagian lain dari upaya mencapai kesejahteraan yang dimaksud.

Smith sangat mendukung konsep *laissez faire passer* yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Menurutnya, perekonomian dapat berjalan dengan wajar tanpa ada campur tangan pemerintah. Ia sangat yakin mekanisme tidak terlihat yang disebut *invisible hands* yang akan mengekonomikan pada keseimbangan. Sebaliknya jika pemerintah campur tangan, yang terjadi adalah inefisiensi dan ketidakseimbangan.

Konsep kesejahteraan (*welfare*) harus diperlakukan serta dipahami secara luas. Maksudnya konsep tersebut bukan hanya argumen para ahli ekonomi, melainkan juga melingkupi persoalan yang sangat luas, dari sosial, politik, dan budaya.

Pada abad ke-18 atau awal abad ke-19 unit ekonomi utama berkisar pada pertanian, perdagangan, dan bisnis yang relatif kecil. Itu pun dikelola, dijalankan, dan dimiliki satu keluarga. Dalam kondisi tersebut, masyarakat mengharapkan terciptanya kebebasan aktivitas dari pendiktean (kontrol) pemerintah. Hasrat untuk meraih kebebasan ekonomi bertepatan dengan perkembangan realitas teknologi ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, unit yang paling efisien dijalankan dalam skala yang berukuran relatif kecil.

Kekuatan pertama yang menjadi pendorong di balik evolusi negara kesejahteraan bersifat politis. Situasi ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka untuk memilih. Fenomena tersebut terakumulasi dalam tuntutan terhadap hak suara yang terjadi di sebagian besar negara Barat pada abad ke-20. Mereka menyadari bahwa hak untuk memilih tidak hanya menyangkut kekuasaan politik untuk memilih perwakilan di parlemen atau kongres, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat luas.

Kekuatan *kedua* di balik pertumbuhan negara kesejahteraan bersifat psikologis. Masyarakat di seluruh dunia, baik masyarakat maju maupun berkembang tidak lagi menerima kesengsaraan sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Kondisi ini diakibatkan oleh menurunnya pengaruh agama, terutama berkaitan dengan konsep nasib. Agama tidak lagi memiliki pengaruh kuat sebagaimana dalam imajinasi masyarakat masa lalu. Sejak saat itu masyarakat lebih yakin bahwa kesejahteraan hidup ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Wacana ini disuarakan di hampir semua negara, baik negara sosialis maupun negara nonsosialis.<sup>2</sup>

Di negara berkembang, kekuatan psikologis ini muncul dalam bentuk kekuatan politik, terutama yang bertujuan bagi tercapainya kemerdekaan bangsanya. Pada hakikatnya, semua peristiwa tersebut sebenarnya dimotivasi oleh keinginan akan kondisi kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Keinginan yang luas terhadap kebijakan negara kesejahteraan tidak murni didasarkan pada sentimen dan kekuatan psikologis. Hal tersebut sesungguhnya mengisyaratkan bahwa dalam sejarahnya umat manusia sudah sampai pada satu tahap ketika mereka membutuhkan cukup pengetahuan dan menguasai alam untuk kesejahteraan.

Prinsip pokok dalam konsep negara kesejahteraan relatif sederhana. *Pertama*, semua anggota masyarakat, karena ia makhluk

<sup>2</sup> William Ebensteain, *Great Political Thinkers*, New York: Holt Rinehart and Wunston, 1960.

Melihat struktur pembentuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008, variabel investasi akan memegang peranan signifikan dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Terlihat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% akan didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi yang diperkirakan tumbuh sebesar 15%.<sup>11</sup>

---

11 Djiman Murdiman Sarosa, "Urgensi Pemberian Insentif Ekonomi dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah" dalam *Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah*, Vol 4, No. 4, Desember 2008, hlm. 21.

## BAB 10

# PENDEKATAN TEORI POLITIK GLOBALISASI

Istilah globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer. Meskipun telah menjadi istilah yang populer, tidak ada definisi tunggal untuk istilah tersebut. Beberapa definisi mengenai globalisasi cenderung dilebih-lebihkan serta mendorong terjadinya kesalahpahaman.<sup>1</sup>

Dalam banyak definisi, terutama yang berangkat dari kaum globalis, konsep globalisasi merujuk pada fenomena yang batas-batas negara bangsa tidak lagi relevan untuk didiskusikan. Ciri utamanya

---

1 Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Tajidu Press, 2005, hlm. 36. Lihat juga Budi Winarno, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

bahwa banyak persoalan kontemporer saat ini tidak dapat dipelajari secara memadai hanya pada tingkatan negara bangsa, dalam arti tiap-tiap negara bangsa dan hubungan internasional.<sup>2</sup>

Ada tiga hal yang sering ditemukan dalam mendefinisikan globalisasi, yakni kesalinghubungan, integrasi, dan kesalingterkaitan.<sup>3</sup> Lodge (1991) mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang menempatkan masyarakat dunia yang bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.

Dengan pengertian demikian, masyarakat dunia hidup dalam suatu era bahwa sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses global. Selain konsep kesalinghubungan, konsep kedua yang sering muncul dalam definisi globalisasi adalah integrasi. Ichlasul Amal mengemukakan bahwa globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global, yaitu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas-batas negara, ideologis, dan lembaga-lembaga politik dunia.<sup>4</sup>

Konsep ketiga adalah interdependensi. Definisi ini mencakup pengertian bahwa sistem ekonomi, khususnya sistem moneter, dunia saat ini sangat bergantung antara satu dan lainnya. Akibatnya, kebijakan-kebijakan pada skala nasional tidak dapat mengabaikan peristiwa pada tingkat global. Demikian juga, sebaliknya, peristiwa-peristiwa di tingkat nasional pada tataran tertentu akan berpengaruh pada ekonomi global.<sup>5</sup>

Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, Martin Khor menarik dua ciri utama globalisasi. *Pertama*, meningkatkan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh

2 Winarno, *Globalisasi Wujud*, hlm. 37-38.

3 Lihat dalam Thomas L. Friedman, *Lexus dan Pohon Zaitun*, Bandung: ITB, 2002.

4 Ichlasul Amal, "Globalisasi, Demokrasi dan Wawasan Nusantara: Perspektif Pembangunan Jangka Panjang", dalam *Wawasan Nusantara Indonesia Menghadapi Globalisasi*, Pusat Kajian Kebudayaan Universitas Bung Hatta, hlm. 1.

5 Winarno, *Globalisasi Wujud*, hlm. 40.

perusahaan trans-nasional ataupun perusahaan dan dana global. *Kedua*, globalisasi adalah "globalisasi" dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan nasional (yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi) yang sekarang ini berada dalam yurisdiksi pemerintah dan masyarakat di satu wilayah negara bangsa bergeser menjadi berada di bawah pengaruh atau diproses badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional.<sup>6</sup>

Ada beberapa cara untuk mengategorikan teori dan penelitian mengenai globalisasi.

Pendekatan pertama yang paling umum adalah pendekatan untuk membandingkan penjelasan antara penyebab tunggal (*mono-causal*) dan banyak penyebab (*multi-causal*) dari sebuah fenomena.<sup>7</sup> Menurut Sklair, pendekatan ini merupakan salah satu cara yang berguna untuk memecahkan masalah, tetapi memiliki kelemahan mendasar. *Pertama*, pendekatan ini pada akhirnya meletakkan pemikir pada keseluruhan penjelasan yang berbeda, misalnya, pemikir yang melihat globalisasi sebagai akibat dari pembangunan kekuatan material teknologi (*material technological forces*) dan yang melihat globalisasi sebagai akibat kekuatan ideologis dan/atau kekuatan budaya, dalam satu lingkaran yang sama. *Kedua*, beberapa pemikir menghadirkan keseluruhan penjelasan monokausal dari segala sesuatu. Hampir semua pemikir sebagai monokausal berusaha menunjukkan relevansi dari sebuah keberagaman faktor seolah-olah cenderung untuk memprioritaskan beberapa faktor di atas faktor yang lain, sedangkan multikausal tidak selalu dapat membuktikan bahwa segala sesuatu menyebabkan segala sesuatu yang lain.

Pendekatan kedua adalah dengan jalan membandingkan fokus dari kajian globalisasi. Dalam aras kedua ini, ada beberapa macam pendekatan, yakni pendekatan sistem dunia (*the world-system*

6 Martin Khor, *Globalisasi: Perangkap Negara-Negara Selatan*, Yogyakarta: Cenderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2002, hlm. 12-13.

7 Lesley Sklair, "Competing Conception of Globalization", dalam *Journal of World System Research*, Vol V, No. 2. <http://csf.colorado.edu/jwsr>.

Kebijakan makroekonomi secara umum mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya nilai tukar rupiah pada Oktober 1998 dan tingkat bunga perbankan mulai menurun. Namun, di satu sisi perekonomian mengalami pertumbuhan minus 13% dan inflasi yang cukup tinggi.

Pada bulan Januari 2000, IMF menyetujui US\$ 5 miliar *Extended Fund Facility* (EFF) untuk tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung program reformasi ekonomi dan struktural. Programnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi, mengurangi utang publik, mengembangkan pasar modal, reformasi perpajakan, mengurangi subsidi secara bertahap, desentralisasi fiskal, melanjutkan restrukturisasi perbankan dan korporasi, privatisasi dan reformasi di berbagai sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan *good governance*.

Kemajuan yang cukup strategis dalam penanganan masalah fundamental yang terjadi sejak krisis 1997 mulai berhasil diatasi. Namun, kemajuan tersebut tidak memicu kemajuan pada sektor real. Untuk menggerakkan sektor real dan memperluas kesempatan kerja diperlukan investasi baru.

Dalam rangka mengakhiri kerja sama dengan IMF, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah serta memonitor hasilnya. Peran IMF tetap ada dan dituangkan dalam *Post Program Monitoring* (PPM) yang merupakan proses konsultasi sebagaimana yang terjadi di negara yang baru saja mengakhiri program dengan IMF.

Setelah tidak lagi bekerja sama dengan IMF dan dalam rangka melanjutkan reformasi untuk mendayagunakan kemampuan sumber daya ekonomi dalam negeri dan meningkatkan daya tahan ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan pada tahun 2003 dan 2004 yang berisi tiga sasaran pokok, yaitu:

- a. memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro;
- b. melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan;
- c. meningkatkan investasi, ekspor, dan penciptaan kesempatan kerja.

## BAB 11

# PENDEKATAN BERBASIS KEKUASAAN DAN PENDEKATAN PILIHAN PUBLIK DALAM EKONOMI POLITIK

Salah satu fokus dalam kajian ekonomi politik adalah memahami kekuasaan dalam interaksinya dengan fenomena ekonomi. Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan dari ide bahwa untuk mencapai suatu tujuan, kita harus melakukan sesuatu untuk memengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita. Dalam upaya ke arah tersebut, kita sering dihadapkan dengan berbagai hambatan. Faktor hambatan bukan merupakan sebuah syarat mutlak. Dalam meraih kekuasaan, hambatan dapat muncul dari diri pribadi dan dari luar. Hambatan juga dapat berbentuk tidak adanya institusi sosial dan politik tertentu.

Hambatan dan kesulitan merupakan faktor penting dalam mendefinisikan konsep kekuasaan. Max Weber dalam bukunya *Economy and Society* mendefinisikan kekuasaan sebagai probabilitas bahwa seorang pelaku dalam hubungan sosial mampu melaksanakan

kehendak sendiri walaupun ada hambatan, tanpa memedulikan dasar-dasar untuk menentukan probabilitas itu.

Secara ringkas, ada tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan alam, kekuasaan terhadap orang lain, dan kekuasaan bersama orang lain.

### A. Penafsiran tentang Kepentingan

Kekuasaan berkaitan dengan kepentingan. Hubungan antara keduanya sangat kompleks. Dalam perspektif Weber, seorang kapitalis bukanlah pemegang tunggal kepentingan, melainkan hanya pelaksana kepentingan orang lain.

Dalam pandangan ekonomi, kepentingan diterjemahkan menjadi pilihan. Selanjutnya, pilihan tersebut secara otomatis menjadi keputusan tentang alternatif yang akan dipilih. Jika seseorang membuat pilihan secara bebas, pilihan itu sesuai kepentingannya. Tidak ada paksaan atas pilihannya tersebut. Konsep kepentingan semacam ini disebut sebagai "kepentingan langsung" (*direct interest*). Dalam istilah Flathman disebut sebagai kepentingan subjektif, dan Lukes menyebutnya dengan kepentingan behavioral. Konsep kepentingan seperti ini cocok untuk konsep kekuasaan sederhana.

Konsep kepentingan kedua disebut dengan kepentingan real atau objektif. Connolly menyebutkan bahwa kepentingan real ini terbentuk karena adanya kesadaran akan diri sendiri dan pilihan yang dibuat dengan informasi penuh.

### B. Kekuasaan dan Perekonomian Pasar

Secara umum, kekuasaan dan ekonomi merupakan dua entitas yang terpisah. Bahkan, ada fakta bahwa keduanya saling menegasikan. Dalam *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, sebuah kamus ilmu ekonomi tidak ditemukan satu istilah tentang kekuasaan. Walaupun demikian, gagasan untuk menyusun sebuah ekonomi politik berdasarkan konsep kekuasaan dan kekayaan merupakan sesuatu yang menarik.

Salah satu kontribusi ekonomi pasar kapitalistik adalah kemampuannya untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan masyarakat tumbuh, individu akan terpenuhi kebutuhannya. Peningkatan kekayaan dapat dimaknai juga sebagai peningkatan kekuasaan dalam arti sebagai kepentingan langsung (*direct interest*).

Berikut adalah tiga contoh kekayaan yang memberikan kekuasaan. Kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan: (a) kontrak tenaga kerja, (b) hubungan produksi dalam perusahaan. Contoh pertama memandang kekuasaan dengan pendekatan berbasis pelaku (*agency oriented view*) bahwa landasan-landasan struktur kekuasaan tunduk pada tindakan strategis pemegang kekuasaan. Contoh kedua adalah hubungan produksi dalam perusahaan, lebih menonjolkan peran dari struktur dalam membuat tenaga kerja bergantung pada kapital sehingga peran dari pelaku menjadi berkurang.

Adapun ilmu ekonomi neoklasik berusaha membatasi fokusnya pada pertukaran yang efisien. Para pemikir ekonomi neoklasik cenderung menghindari istilah "kekuasaan" (*power*). Jika ada, hal itu sebatas membicarakan kekuasaan dalam arti kekuasaan atas orang lain dengan fokus terhadap efisiensi yang dikurangi. Dengan strategi ini, ekonomi neoklasik tidak lagi menjadi ilmu tentang efisiensi alokasi.

### C. Ekonomi Politik Pendekatan Pasar versus Pendekatan Negara

Secara teoretis ada dua pendekatan ekonomi politik yang saling berhadapan, yaitu pendekatan yang berpusat pada pasar (*market oriented*) dan pendekatan yang berpusat pada negara (*state centered*). Pendekatan yang berpusat pada negara didasarkan pada asumsi bahwa negara memiliki agenda sendiri dalam hubungannya dengan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>1</sup> Eric

1 James A. Caporaso dan David P. Levine, dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 66.

## BAB 12

# NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)

### A. Perkembangan Konsep *Welfare State*

Konsep *welfare state*<sup>1</sup> berkaitan dengan masalah demokrasi dengan berbagai alasan berikut. *Pertama*, jika memang dalam konsep demokrasi individualisme dan liberalisme diyakini sebagai prinsip yang dapat melindungi terjaminnya kebebasan individualisme dari campur tangan negara (termasuk dalam melakukan aktivitas apa pun, termasuk aktivitas ekonomi), mengapa konsep *welfare state* justru berkembang pertama kali di negara dengan fondasi demokrasi liberal yang sangat kuat?

---

1 William Ebenstein. *Great Political Thinkers*, New York: Holt Rinehart and Winston, 1960.

*Kedua*, faktor-faktor apa saja yang secara spesifik mendorong munculnya *welfare state* di negara-negara yang secara historis adalah negara-negara dengan tradisi demokrasi yang sangat kuat. *Ketiga*, secara prinsip, apakah yang disebut dengan *welfare state*? *Keempat*, untuk menjawab kritik kelompok yang secara skeptis menyatakan bahwa *welfare state* adalah prinsip yang akan menggerogoti demokrasi liberal, bagaimana prinsip-prinsip *welfare state* dilaksanakan sehingga prinsip-prinsip liberalisme dalam demokrasi tidak perlu terkikis? *Kelima*, apakah perjalanan waktu, pelaksanaan *welfare state* mereduksi prinsip liberalisme dalam demokrasi?

Dalam perkembangannya, konsep *welfare state* meyakini bahwa proses revolusi industri mampu mengubah pengaturan ekonomi antara pemilik modal dan pekerjanya, dan mengubah pola hubungan warganegara dengan negaranya. Masa sebelum revolusi industri ditandai dengan kemandirian individu, tidak hanya dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga politik.

## B. Faktor-faktor Pendorong Munculnya *Welfare State*

*Pertama*, faktor ekonomi. Kehidupan ekonomi setelah revolusi industri secara faktual telah memaksa munculnya konsep *welfare state*. Revolusi industri mengubah pola kehidupan ekonomi warga masyarakat, dari kehidupan agraris dan perdagangan terbatas menjadi ekonomi industri yang menyebabkan kebergantungan terhadap upah dari majikan. Pemerintah menjadi satu-satunya sumber perlindungan bagi para buruh agar kewajiban mereka dipenuhi serta agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan (menyusun berbagai program) agar para buruh tetap dapat hidup secara layak dalam kondisi apa pun. Tindakan yang terpenting, antara lain menyusun program asuransi sehingga buruh "dipaksa menabung untuk kesulitan yang muncul kemudian".

*Kedua*, faktor politik. Perluasan hak pilih kepada segmen masyarakat pada abad dua puluh (sebelumnya hak pilih sangatlah terbatas) menimbulkan kesadaran baru kepada para pemilih bahwa hak pilih mereka merupakan senjata ampuh untuk memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh para politisi. Mereka semakin

menyadari bahwa hak pilihnya dapat menjadi senjata tekan ampuh untuk memaksa politisi merancang program-program khusus untuk mereka jika ingin terpilih. Jika pada awalnya, hak pilih terbatas (bagi penduduk laki-laki) kulit putih saja seperti pada demokrasi kuno atau demokrasi pra-abad dua puluh, dan hak politik bersifat eksklusif untuk orang kaya, hak pilih universal (menjadi *universal suffrage*) telah memperluas hak politik bukan hanya bagi kelompok kaya yang relatif tidak terlalu membutuhkan perlindungan ekonomi dari negara, tetapi juga bagi kelompok miskin yang secara ideologis membutuhkan perlindungan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama dalam kewajiban negara memaksa pemilik modal memenuhi kewajiban kepada pekerja serta kebutuhan dasar lain. Pada tahap perkembangannya, hubungan otomatis antara pemilih dan rancangan program telah menghapus konsep partisan politik sehingga *welfare state* lama-lama menjadi isu bi-partisan (di Inggris dan di Amerika Serikat).

*Ketiga*, faktor psikologis. Secara universal manusia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Melemahnya pengaruh agama di negara-negara Barat dengan datangnya abad pencerahan dan munculnya revolusi industri telah mengubah orientasi hidup kebanyakan warga. Kesejahteraan bukanlah keinginan hidup yang tidak bermoral, bahkan telah diekspresikan secara jelas dalam kehidupan politik, sesuatu yang pada masa sebelumnya tidak terpikirkan karena dianggap sebagai nilai profan. Di negara berkembang, keinginan merdeka dari penjajahan bukan semata-mata keinginan politik, melainkan didorong untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan pengaturan sendiri. Dengan demikian, semua bentuk demokrasi akan mengadopsi ide *welfare state* menjadi bagian dari ideologi politik, bukan hanya tuntutan ekonomis.

## C. *Welfare State* sebagai Prinsip dan Tanggapan terhadap Skeptisme

Konsep *welfare state* diadopsi oleh F.D. Roosevelt untuk memenangkan pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 1933, tahun puncak depresi ekonomi. Melalui kebijakannya yang disebut *New Deal*, yang berisi konsep *welfare state*, depresi ekonomi besar ini perlahan-

politik dan ekonomi mempunyai kepentingan sendiri yang harus dipertahankan.

*Kedua*, pentingnya pertalian satu sama lain tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam suatu ikatan bersama dan solidaritas guna mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka, terutama menyangkut isu-isu sosial-ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, upah yang layak, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

*Ketiga*, belajar dari pengalaman negara kesejahteraan (*welfare state*) di Eropa Barat, tidak dapat diingkari sentralnya perjuangan gerakan buruh yang menuntut hak-hak ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya gerakan buruh dalam menuntut kesejahteraan rakyat.

*Keempat*, dengan format dan arena politik yang lebih terbuka seharusnya tersedia kesempatan politik bagi kelompok-kelompok di masyarakat untuk menata kembali masa depannya, terutama yang bersifat jangka panjang daripada menekankan kepentingan sesaat.

## BAB 13

# PERAN NEGARA DALAM EKONOMI POLITIK

### A. Dimensi Kekuasaan dalam Ekonomi

Dalam pendekatan ekonomi politik, aktivitas ekonomi tidak sekadar dipandang memperhatikan cara meningkatkan kemakmuran, tetapi juga mengorganisasikan hasil produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika ekonomi klasik menghindari persoalan normatif, termasuk netral dalam etika dan moral, dalam pendekatan ekonomi politik, aktivitas ekonomi tidak sekadar dimensi kekuasaan dalam ekonomi yang membawa kemakmuran, tetapi juga mempertimbangkan etika dan moral. Perilaku manusia tidak sekadar berpedoman pada rasionalitas, tetapi juga diwarnai dengan filantropi, moralitas, dan pertimbangan etika dan rasa tanggung jawab sosial. Berkaitan dengan peran negara, pendekatan ini mengutamakan peran lembaga sosial dan politik,



termasuk lembaga kekuasaan sebagai alat produksi kemakmuran (Derrick K. Gondwe, dalam Muhtar Mas'ood, 2003: 26).

Dengan demikian, ketika zaman semakin berkembang, kegiatan ekonomi muncul sebagai hasil interaksi yang kompleks dari berbagai aspek maka pendekatan ekonomi politik tersebut berkembang untuk menjelaskan cara pasar dan negara harus bekerja sama, cara mengimbangi keuntungan individual dan kepentingan publik dan mengubah relasi yang bersifat sukarela pada saat tertentu dalam transaksi yang berdasarkan relasi kekuasaan. Peran pemerintah dalam pembangunan telah menjadi objek pembahasan yang menarik sejak lama. Aliran klasik, yang menganut kebebasan pasar, menganggap campur tangan pemerintah sebagai sesuatu yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan objektif dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar. Penerusnya, para penganut aliran neoklasik, bahkan menuduh bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi. Campur tangan pemerintah dalam arti berfungsinya birokrasi melahirkan regulasi, proteksi, dan subsidi impor yang merugikan para konsumen. Ketiga hal ini dianggap kelompok neoklasik sebagai perilaku tidak baik yang harus dihindarkan (teori neoklasik). Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, yang terjadi adalah persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, bukan kebebasan pasar yang terjadi, melainkan restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J. M. Keynes yang dipandang sebagai salah seorang tokoh terkemuka ekonomi pada bagian awal abad ke-20 menganggap kebebasan pasar tanpa campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumber daya dan *output* secara optimal. Oleh karena itu, Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis (teori keynesian). Sejalan dengan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan maksimum keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumber daya yang optimal bagi kepentingan umum.

## B. Negara Relasi Kekuasaan

Kekuasaan adalah penggunaan sejumlah sumber daya (*aset*, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya adalah relasi. Lembaga kekuasaan formal terbesar dalam entitas bangsa adalah negara. Dengan demikian, negara mempunyai sumber daya utama yang tidak dimiliki otoritas lainnya, yaitu kekuatan legalitas dan legitimasi, yaitu hak untuk memaksa (*power to coerce*). Negara memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan berbagai regulasi ekonomi yang mengatur semua aktivitas ekonomi, seperti melakukan monopoli, mengatur moneter, bahkan menentukan bentuk dan aliran pasar (Didik J Rachbini, 2004: 13-16). Dengan kata lain, situasi aktivitas ekonomi dapat dilakukan individu ataupun institusi negara, tetapi pola pemerataan akan mengikuti pola relasi kekuasaan. Misalnya, di negara yang pola relasi kekuasaannya bersifat tertutup, kesenjangan hasil-hasil aktivitas ekonomi akan tinggi, dengan konsentrasi aset dan akses kekayaan dominan berada di tangan kelompok elite. Hal ini terjadi pada masa Orde Baru ketika aset kekayaan nasional dominan berada di tangan sekelompok kecil elite ekonomi yang memiliki akses besar kepada elite politik.

### 1. Sumber Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memengaruhi individu lain ataupun kelompok lain. Kekuasaan yang dimiliki seseorang akan menempatkan orang tersebut dalam kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang dipengaruhinya. Pada umumnya kekuasaan menciptakan suatu hubungan yang vertikal dalam suatu organisasi. Kekuasaan juga akan menentukan orang-orang yang pantas dan seharusnya mengambil keputusan dalam suatu organisasi.

Sumber kekuasaan terdiri atas tiga macam, yaitu kedudukan, kepribadian, dan politik.

Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan dibagi menjadi beberapa jenis berikut.

#### a. Kekuasaan formal atau legal

Kekuasaan formal atau legal adalah kekuasaan yang didasarkan

memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural, yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan nisbah kapital-output.

3. Model *input-output* Leontief. Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan model ini, perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran *input-output* antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien *input-output* dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan.
4. Model pertumbuhan Lewis khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang yang banyak (padat) penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk pada sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.
5. Model pertumbuhan ekonomi Rostow Model menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tinggi.

## BAB 14

# PENGARUH LIBERALISASI TERHADAP EKONOMI POLITIK TINGKAT LOKAL DI INDONESIA

Masuknya pengaruh globalisasi ke tingkat lokal membawa liberalisme dan kapitalisme. Globalisasi menjadi pintu gerbang bagi negara-negara kapitalis, berlindung di bawah bendera organisasi internasional, masuk ke negara-negara berkembang dengan semangat liberal dan kapitalis mereka. Negara-negara kapitalis tersebut sangat haus akan sumber-sumber daya baru yang dapat dieksploitasi dengan harga murah dan diolah untuk menambah daya jualnya.

Kapitalisme masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, terutama dibawa oleh organisasi *International Monetary Funds* (IMF) yang senantiasa menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Program restrukturisasi nasional merupakan saran wajib diikuti pencabutan subsidi sektor-sektor utama, seperti pendidikan, minyak dan gas bumi, dan privatisasi Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Bersamaan dengan kapitalisme, liberalisme pun masuk melalui instrumen pers bebas, penegakan demokrasi, dan arus budaya asing yang mengalir deras tanpa halangan melalui media-media beraneka ragam dan bentuk.

Kapitalisme memang membawa Indonesia masuk ke dalam pasar bebas dunia, dan semestinya Indonesia bisa bangkit menjadi pemain besar ekonomi dunia. Akan tetapi, Indonesia hanya menjadi penonton, bukan pemain di pasar dunia. Kapitalisme telah menggerogoti kemampuan Indonesia, terutama kekuatan ekonomi lokal bangkit menjadi raksasa ekonomi dunia seperti halnya Cina dan India.<sup>1</sup> Di sinilah sumber persoalan ekonomi politik di tingkat lokal muncul yang mewarnai keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi tahun 1999 merupakan salah satu dampak dari masuknya globalisasi ke tingkat lokal. Desentralisasi telah membuka peluang baru pemain ekonomi lama bermain politik, melestarikan jejaring bisnis mereka di daerah, memindahkan *crony capitalism*, *rent-seeking bureaucracy*, dan melahirkan *shadow state*.<sup>2</sup>

*Crony capitalism* atau kapitalisme kroni merupakan terminologi yang digunakan untuk melukiskan ekonomi kapitalis bahwa kesuksesan bisnis bergantung pada dekatnya hubungan pengusaha dengan aparat pemerintah. Kronisme ini terjadi di negara berkembang dengan memberikan perlakuan khusus kepada para pengusaha, misalnya pembebasan pajak, pemberian izin khusus, bantuan pemerintah, dan lainnya. Tujuan praktik kroni tersebut adalah melanggengkan kekuasaan pemerintah dengan memberikan akses kepada pengusaha untuk mengalirkan dana sebagai imbalan atas kemudahan usaha yang diberikan pemerintah.

1. Menurut perkiraan G20 pada tahun 2009, Indonesia bersama dengan Cina, India, Brazil dapat menjadi pemain utama pasar dunia karena keunggulannya.

2. Nordholt, Henk S. dan Van Klinken G. (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hal tersebut pada akhirnya menyuburkan korupsi sehingga muncul *shadow state* sebagai tandingan istilah negara konvensional.<sup>3</sup>

Konsep *shadow state*, antara lain bercirikan suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh aparaturnegara yang bertindak berdasarkan kepentingan kaum swasta ataupun aktor-aktor eksternal lainnya di luar institusi negara. Aktor-aktor tersebut dapat merupakan penyedia jasa dan barang kepada pemerintah, dan pemerintah berkewajiban membeli kepada mereka tanpa melalui prosedur pembelian yang legal misalnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa atau lelang. *Shadow state* digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis, yang senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Kerja sama di antara mereka akan menimbulkan gejala monopoli dalam penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi ketidakpastian. Warga negara yang hidup di dalam *shadow state* ditandai dengan lebarnya jurang kemiskinan antara miskin dan kaya sebagai akibat tidak adanya aturan tegas dalam memberikan akses kesejahteraan bagi kaum miskin.

Kebijakan ekonomi lokal pemerintah pusat kepada daerah salah satunya adalah melakukan desentralisasi fiskal sebagai upaya mendesentralisasikan kewenangan daerah untuk meningkatkan kemampuan memungut pajak dan retribusi. Peran pemerintah pusat sangat besar dalam upaya merancang desentralisasi fiskal berimbang di setiap daerah. Dengan menjalankan fungsi ekstraktif (memungut atau menyerap), regulatif (mengatur), dan distributif (menyalurkan), daya saing daerah dalam perekonomian diharapkan turut menguat. Dampak positif lainnya adalah daerah dapat mengurangi timbulnya politik anggaran lokal yang merugikan bagi masyarakat lokal.

Teori desentralisasi fiskal menekankan distribusi tanggung jawab finansial atau pembiayaan sebagai komponen utama dari desentralisasi.

3. (Weber, Negara Konvensional)

Definisi negara konvensional menurut Weber memiliki karakteristik, antara lain:

1. aturan administratif dan kepastian penegakan hukum;
2. kekuasaan atas warga negara dan suatu wilayah tertentu;
3. monopoli dalam penggunaan kekuasaan memaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Caporaso, David P. Levine. 1997. *Theory of Political Economy*. New York: Cambridge.
- Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decisions Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown.
- Amal, Ichlasul. t.t. "Globalisasi, Demokrasi dan Wawasan Nusantara: Perspektif Pembangunan Jangka Panjang", dalam *Wawasan Nusantara Indonesia Menghadapi Globalisasi*. Pusat Kajian Kebudayaan Universitas Bung Hatta.
- Amy L. Freedman. t.t. *Consolidation or Withering Away of Democracy? Political Changes in Thailand and Indonesia*.

- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. Cet. Ke-4. Jakarta: LP3ES. hlm. 104.
- Baake, David. 2005. "Prospects for Libertarian Socialism", *Zmag* (June).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP. 2008. "Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah: 2001-2007." Pdf copy (Juli). Lihat di [http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran\\_ID.pdf](http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf).
- Balaam, David N and Michael Veseth. 1997. *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*.
- Bennett, Bruce M. 1967. *International Regionalism and The International System: A Study in Political Ecology*. Chicago: Rand McNally.
- Berlin, Isaiah. 2000. *Karl Marx: Riwayat Sang Pemikir Revolusioner*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Brown, Michael. 1995. "The Keynesian Model", dalam *Models in Political Economy*. London: Penguin. pp. 57-71.
- Caporaso, James A. David P. Levine. 1997. *Theory of Political Economy*. New York: Cambridge.
- Caporaso, James A., dan David P. Levine dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep Yang Komprehensif*. 2006. Jakarta: Erlangga.
- Chaniago, Andrinof A. Widjanarko. 2001. *Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Deliarnov. 2002. *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi Hanggraeni. 2009. "Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja?" Artikel dalam *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 6, hlm. 27.
- Ebensteain, William. 1960. *Great Political Thinkers*. New York: Holt Rinehart and Wunston.

- Friedman, Thomas L. 2002. *Lexus dan Pohon Zaitun*. Bandung: ITB.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Ekonomi of International Relations*. NJ: Princeton University Press.
- Göçmen, Dogan. 2007. *The Adam Smith Problem*. London: Tauris Academic Studies.
- Hall dan Soskice dalam L.J. Touwen. *Welfare State and Market Economy in Netherlands, 1945-2000: Macroeconomics Aspect of a Coordinated Economy*, 2004 hlm. 5 dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, 2006.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan Ruang Publik dalam teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hawlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Hirst, Paul and Grahame Thompson. 1996. *Globalization in Question*. Cambridge: Blackwell Publisher Ltd.
- Hoppe, Hans-Hermann. 2007. *Teori Umum Keynes dalam Pandangan Misesian*. Ciputat, Indonesia.
- Keohane, Robert O and Joseph S. Nye, Jr. 1975. "International Interdependence and Integration", Fred I. Greenstein (Ed.), *International Politics Handbook of Political Science*. Vol. 8, California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Khor, Martin. 2002. *Globalisasi: Perangkap Negara-Negara Selatan*. Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Krueger, Anne O. 1974. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society," *American Economic Review*, 64(3), June.
- Kuhnle S. dan S.E.O. Hort. 2004. *The Developmental Welfare State in Scandinavia: Lessons for the Developing World*. UNRISD.
- Kusumandaru, Ken Budha. 2003. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan terhadap Franz Magnis -Suseno*. Resist Book.
- Labib, Rahmat S. t.t. *Privatisasi dalam Pandangan Islam*. Dikutip dari Sembel, M. Roy. *Strategi Privatisasi di Indonesia*.